Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan E-ISSN: 2809-8544

INOVASI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KONAWE

Liswatin

Dosen Universitas Lakidende Unaaha lisawtintin87@gmail.com

Abstrak

Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (studi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten konawe). Peningkatan PAD Kabupaten Konawe selama 5 tahun terakhir tidak lepas dari peran badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten Konawe. Tujuan untuk mengetahui inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Konawe yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe adalah penguatan sistem pungutan, yang meliputi perbaikan sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem baru yang dilakukan yaitu sistem keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk kemudahan dalam proses pungutan dan sistem aplikasi manajemen pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas kerja aparat. Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe harus ada untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan akan menjadi acuan dalam pengembangan pengelolaan pajak. Selain itu TKT yang akan dikembangkan dalam riset ini ialah penelitian dasar yang target akhirnya 2.

Kata Kunci: Inovasi, Pajak, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Kebijakan penggunaan dan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber - sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2017 lalu, tidak memenuhi target. Bahkan PAD yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya terpenuhi 54 persen saja. Dengan kekurangan target sebesar 46 persen. "Target PAD pada tahun 2017 sebesar 74 miliar, dan PAD yang terpenuhi masih jauh dari target, disebabkan berbagai hambatan," Berikut ini Tabel Realisasi Penerimaan Pajak menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara:

ISSN 2809-8544 9 772809 854009

Liswatin

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15

		Tabel 1.1				
Rea	alisasi Penerimaan I	Pajak menurut	Kabupaten/K	ota, 2015 – 20	18 (000 Rp)	
Kabupaten/Kota		2015	2016	2017	2018	
Kab	oupaten					
1	Buton	<u>.</u>	_	-		
2	Muna	- 1	-	-		
3	Konawe	47 487 443	52 261 079	34 978 498	44 813 137	
4	Kolaka	- [-	-		
5	Konawe Selatan	29 103 141	51 090 866	56 855 863	43 628 436	
6	Bombana	-	-	-		
7	Wakatobi					
8	Kolaka Utara	-	-	-		
9	Buton Utara					
10	Konawe Utara	13 365 413	34765929	12958026	40 802 549	
11	Kolaka Timur					
12	Konawe Kepulauan	1 584 980	2 890 837	5 076 502	3 233 951	
13	Muna Barat	<u>-</u> 1	-	-		
14	Buton Tengah	-	-	-	8.	
15	Buton Selatan					
Kot	a/Municipality					
1	Kendari	530 245 957	552 662 485	695 792 462	726 426 199	
2	Baubau	-	2	-		
Jumlah		493 782 997	515 910 837	802 761 556		

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada penurunan penerimaan pajak tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2016 disebabkan berbagai hambatan. Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam meningkatakan Penerimaan di Bidang Pajak.

Pengelolaan terhadap pajak dan retribusi daerah yang kurang transparan dalam arti keterbukaan informasi kepada publik sejatinya dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di dalam mengelolah keuangan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli daerah. Serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri terhadap PAD. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe)".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe?

Adapun urgensi penelitian ini adalah untuk dapat memberikan masukkan seperti apa inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan meningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe.

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Inovasi

Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010) inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Dalam penerapannya inovasi memiliki atribut yang melekat didalam inovasi tersebut. Inovasi yang dimaksud menurut Everett M. Rogers dalam Suwarno (2008:17) antara lain sebagai berikut:

- 1. Relative advantage atau keuntungan relatif,
- 2. Compatibility atau kesesuaian,
- 3. Complexity atau kerumitan,
- 4. Triability atau kemungkinan dicoba,
- 5. Observability atau kemudahan diamati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Inovasi

Karakteristik inovasi terdiri dari: keuntungan relatif dalam bidang ekonomi, (faktor prestise sosial, kenyamanan dan kepuasan), ketahanan / kekuatan (tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang konsisten dengan nilai yang ada, pengalaman-pengalaman masa lalu, dan kebutuhan akan para pengguna yang potensial), kompleksitas (tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang sulit untuk dimengerti dan digunakan), daya uji coba (tingkat dimana inovasi dalam batas—batas tertentu dapat diujicobakan), observabilitas (tingkat dimana hasil-hasil inovasi dapat dilihat oleh pihak lain) (Sumarwan, 2010).

Konsep Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Pengertian Pajak

Berbicara mengenai Pajak dan retribusi, dapat dijumpai atau ditemukan berbagai definisi. Berkaitan dengan definisi pajak itu sendiri, pengertian pajak beraneka ragam tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya. Liberty Pandiangan dalam bukunya, Aderson mengemukakan bahwa "tax is a compulsory contribution, levied by the state (in the broadsense) upon persons property income and privileges for purposes of defraying the expences of government "Artinya Pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Liswatin

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15



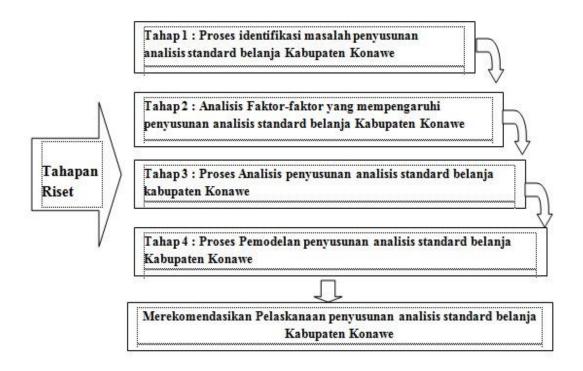
2. Retribusi Daerah

Muhammad Djafar Saidi (2010) dalam bukunya, Retribusi menurut Munawir ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar, dan retribusi air minum. Retribusi (*Retribution*) merupakan uang iuran yang dibayarkan sebagai pengganti jasa pemerintah telah memberikan ijin sesuatu kepada pemakai, atau suatu pungutan dimana terdapat timbal balik secara langsung kepada setiap pembayar retribusi. Jadi retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya.

METODE PENELITIAN

Diagram Alur Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada seperti apa inovasi pengeloaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah serta merekomendasikan inovasi apa yang harus diterapkan dalam pengeloaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dapat mengembangkan pendapatan asli daerah. Melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan dalam penelitian (wawancara, observasi, FGD dan kaji dokumen). Dalam upaya pencapaian penelitian yang jelas dan terukur maka peneliti membuat secara ringkas bagan alir penelitian. Berikut bagan penahapan penelitian:



Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

Lokasi, Obyek dan Unit analisis Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe. Untuk membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan sampel secara *purposive* yaitu dengan sengaja pada SKPD tersebut sebagai sumber data serta untuk penggalian data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu, yaitu para *stake holders* yang biasa terlibat dalam proses pembuatan analisis standard belanja di dinas masing-masing. Sehubungan hal tersebut, informan yang dipilih dalam penelitian ini (melalui metode wawancara) adalah : 1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe, 2), Sekretaris BPPRD, 3) Aparat Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe, yakni 3 orang staf di Kabupaten Konawe dan 7 masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data penelitian, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen (Creswell, 2016:254). Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data tersebut.

- a. Observasi (pengamatan).
 - Proses pengumpulan data melalui observasi ini peneliti akan turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas dilokasi penelitian.
- b. Wawancara
 - Teknik pengumpulan data melalui wawancaraakan dilakukan dalam dua bentuk yaitu wawancara mendalamdan *focus group discussion* (FGD).
- c. Studi Dokumen
 - Sebagian besar data tersimpan dalam bahan dokumen berupa surat-surat, catatan harian, foto dan sebagainya. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui fenomena-fenomena masalah yang pernah terjadi di masa silam.

Analisis Data

Proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Miles, Huberman, & Saldana, 2014:10) yaitu *data colletion, data display, data condensation, and conclusions*. Analisis data dimulai pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan i n f o r m a n y a n g hasilnya dibuatkan dengan transkrip hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi. Dilanjutkan dengan meringkaskan dan memilah data hasil wawancara dan data hasil observasi serta menyisihkan data yang tidak relevan sampai pada penarikan kesimpulan.

Liswatin

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15



Pembagian Tugas Tim Pengusul

Dalam penelitian ini, masing-masing Anggota Tim Pengusul memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengusul

Mengkoordinasikan proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpertasi data, dan penyusunan laporan penelitian. Mengkoordinasi persiapan instrumen penelitian, perlengkapan penelitian, dan instrumen penunjang.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar. Bertanggungjawab terhadap pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian.

2. Anggota Tim Pengusul

Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpertasi data, dan penyusunan laporan penelitian. Membantu ketua dalam persiapan instrumen penelitian, perlengkapan penelitian, dan instrumen penunjang. Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar. Turut bertanggungjawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPPRD Kabupaten Konawe

1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendataan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kabupaten Konawe belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor: KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka pemerintah Kabupaten Konawe menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Mendagri. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang baru dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang terdiri dari 1 (satu), Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) urusan dan 4 (empat) seksi.

Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 mei 1988 tentang sistem dan prosedur perpajakan/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri 061/1861/PUOD.

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan E-ISSN: 2809-8544

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah Kabupaten Konawe membentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Konawe Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Konawe dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub- bagian dan 5 (lima) sub badan dengan masing-masing 4 (empat) seksi kelompok jabatan fungsional.

2. Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe

a. Keunggulan Relatif (Relative Advantage)

Keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi pengelolaan pajak dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi pengelolaan pajak dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial (gengsi), kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting.

Keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu inovasi pengelolaan pajak dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise social, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Sebagai contoh para-adopter akan menilai apakah suatu inovasi pengelolaan pajak itu relatif menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang lainnya atau tidak. Untuk adopter yang menerima secara cepat suatu inovasi, akan melihat inovasi itu sebagai sebuah keunggulan.

Keunggulan relatif menjadi tujuan utama dalam melakukan suatu inovasi, Keunggulan yang dimaksud ialah pemberian pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat kepada pihak penerima layanan. Adapun keunggulan penggunaan pengelolaan pajak dengan online dari penjelasan (CIR) Kabupaten Konawe sebagai informan kunci yang dipilih ketika wawancara ialah sebagai berikut:

"Pengelolaan pajak dengan online ini dibuat guna memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak, karena wajib pajak tidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak untuk mengambil SSP dan mengisi secara manual seperti sebelumnya, wajib pajak bisa melakukan pembayaran dimanapun dan

Liswatin

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15



kapanpun dengan menggunakan smartphone atau laptop yang terhubung ke jaringan internet, atau bisa juga dengan online yang kami sediakan di kantor di lantai dasar"(Wawancara tanggal 12 Mei 2019)

b. Kesesuaian (Compatibility)

Kesesuaian (compatibility), yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai (values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Kesesuaian adalah derajat dimana inovasi pengelolaan pajak tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai (compatible).

Kesesuaian penggunaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan (HR) yang terpilih terkait kesesuaian dalam inovasi pelayanan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

"Wajib pajak semakin tahun semakin bertambah dan pegawai tetap segitu dan tidak menggunakan teknologi informasi? tentunya ya kita tidak bisa menolong untuk memberikan pelayanan terbaik, karna kalau pakai hard copy mereka datang satu satu kesini mau berapa lama antri logikanya apakah kita akan menahan orang berlari untuk menunggu orang yang jalan kaki? Ya tidak seperti itu, orang yang jalan kaki harus ikut berlari agar tidak tertinggal itu maksudnya jadi ayolah kita berlari bersama supaya makin cepet dan wp makin puas sama pelayanan kita" (Wawancara tanggal 12 Mei 2019)

c. Kompleksitas (Complexity)

Kompleksitas (complexity), yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan manggunakan inovasi bagi penerima. Kompleksitas adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya atau sulit dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Tetapi apabila suatu inovasi sulit untuk dipahami dan sulit dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin sulit pula suatu inovasi dapat diadopsi.

Karena online merupakan inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang baru dalam pembayaran pajak, sesuatu yang baru tentu memiliki kesulitan bagi beberapa pihak yang kurang memahami, adapun yang peneliti temui kesulitan yang dihadapi oleh pihak aparat berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan informan (AT) ialah sebagai berikut:

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan E-ISSN: 2809-8544

"Pada saat kami memberikan pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak melalui online dengan menggunakan mesin online yang disediakan disini kemarin saya salah input data karna belum terlalu paham seperti apa mekanismenya, jadi sebagai petugas kami bilang harus melakukan pemindah bukuan dan masa tunggu kurang lebih satu bulan baru bisa melakukan pembayaran ulang" (Wawancara tanggal 15 Mei 2019).

Mencermati hasil wawancara diatas penulis menilai bahwa masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh aparat pada saat melakukan entry dokumen perpajakan karena kurangnya pemahaman mekanisme pembayaran sehingga harus melakukan pemindahbukuan dengan masa tunggu kurang lebih satu bulan.

d. Trialabilitas atau Kemampuan Uji Coba

Trialabilitas (*trialability*), yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Kemampuan untuk diuji cobakan atau trialabilitas adalah derajat dimana suatu inovasi dapat diuji coba dalam batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam pengaturan (setting) sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan (mendemostrasikan) keunggulannya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD-nya) sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah.

Maka inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah kabupaten Konawe dalam usaha mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber–sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Inovasi tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber pendapatan asli daerah, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi yang konsisten. Sejalan dengan hal tersebut ada beberapa factor yang mendukung maupun factor penghambat inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Liswatin

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15



4. Faktor Pendukung Inovasi dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Faktor pendukung inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah

Mengingat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe tidak pernah mencapai target realisasi. Rendahnya pendapatan daerah sangat mempengaruhi perekonomian daerah dan menghambat proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun pemerintah daerah masih ketergantungan dengan pembiayaan dari pusat sehingga kurang inovatif untuk menggali potensi daerah yang dapat di jadikan sebagai sumber pendapatan daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah tentang Partisipasi Pihak Ketiga yang orientasinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe yang maksud dan tujuannya telah dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan kunci CIR yang mengatakan bahwa:

"Upaya yang kami lakukan sejauh ini cukup optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah terus kami optimalkan dalam proses pemungutan, dan pada tahun 2018 kami membuat kebijakan melalui partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah yang maksud, tujuan, tata cara pengelolaannya tertuang dalam perda tersebut" (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2019)

5. Faktor Penghambat Inovasi dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Faktor penghambat inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang

Bertambahnya fungsi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe dengan fungsi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB yang meliputi Fungsi Pendataan dan Penilaian, Fungsi Pengolahan Data dan Informasi, Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan, Fungsi Penetapan dan Pelayanan Administrasi BPHTB dan PBB serta Fungsi Penagihan dan Penyuluhan. Terkait dengan penambahan fungsi tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan melaksanakan pengadministrasian PBB secara otonom. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Begitu pula dalam

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

menyukseskan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Senada dengan pernyataan yang diberikan oleh informan (RM) mengatakan bahwa:

"Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe telah dilakukan penyempurnaan dengan membentuk susunan Kelompok Kerja (Pokja) guna mengakomodasi adanya penambahan fungsi berkaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak tersebut. (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2019)

b. Pemahaman Masyarakat yang Kurang

Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai subjek pajak/subjek retribusi tentang peraturan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Masyarakat yang dikatakan sebagai wajib pajak seharusnya lebih memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Senada dengan pernyataan yang diberikan oleh informan (HR) mengatakan bahwa:

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi, namun kurangnya pemahaman masyarakat ini terus saja menjadi faktor penghambat dalam peningkatan PAD. Masyarakat cenderung ingin didatangi untuk melakukan proses penagihan, padahal kami telah jelaskan tentang prosedur pemungutannya yaitu bisa melalui camat, lurah atau bisa langsung ke bank yang sudah di tunjuk tiap kecamatan". (Wawancara pada tanggal 06 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang mengatakan bahwa masih banyaknya masyrakat yang kurang paham tentang peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi. Sebagai wajib pajak dan wajib retribusi masyarakat wajib mengetahui peraturan yang mengatur pajak dan retribusi daerah agar lebih mempermudah proses penagihan. Masyarakat wajib pajak

PENUTUP

Kesimpulan

1. Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Konawe yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe adalah penguatan sistem pungutan, yang meliputi perbaikan sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem baru yang dilakukan yaitu sistem keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk kemudahan dalam proses pungutan dan sistem aplikasi manajemen pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas kerja aparat, kebijakan Pemerintah Pusat melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe meliputi prosedur pemungutan dan mekanisme pembayaran yang

Liswatin

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15



jelas PBB yang berpotensi besar meningkatkan PAD. Ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan proses pemungutan, intensifikasi yang dilakukan adalah rutin melakukan sosialisasi. Sosialisasi melalui media cetak seperti Koran, membuat dan melakukan penyebaran leaflet/brosur mengenai PBB secara langsung di tempat-tempat pelayanan masyarakat seperti kantor kelurahan, desa, dan kecamatan dengan menggunakan metode door to door, memasang papan himbauan pembayaran pajak di tempat-tempat umum, dan membuat pojok pajak di setiap kelurahan yang mudah diakses masyarakat.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Konawe dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah pertama faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah, kerjasama yang dilakukan dengan pihak terkait peningkatan pendapatan asli daerah, dan adanya koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola pendapatan asli daerah, pemahaman masyarakat sebagai subjek pajak dan subjek retribusi yang kurang serta terhadap peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan petugas penagih yang kurang (kolektor) sebagai petugas penagih menyebabkan terhambatnya peningkatan pendapatan asli daerah.

Saran

- 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe hendaknya dapat meningkatkan lagi inovasi pengelolaan pajak dan retribusi yang sudah ada, terutama memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui program perencanaan yang lebih baik. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi serta kepada petugas pemungut PBB dalam memberikan penyadaran akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Memberikan pelatihan secara kreatif dan inovatif dengan melihat teknologi yang semakin canggih dan memanfaatkan potensi kearifan lokal serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
- 2. Pemerintah Daerah hendaknya dapat meningkatkan lagi inovasi Pengelolaan pajak dan retribusi daerahnya terutama menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor, memberikan kemudahan bagi investor, dan peningkatan objek pajak dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan dari partisipasi pihak ketiga, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan regulasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Tidak hanya berpedoman pada Undang Undang yang sifatnya secara nasional. Sebab, pada dasarnya kondisi dan keadaan pendserta apatan asli daerah memiliki potensi sumber pendapatan asli daerah yang berbeda-beda.

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Pervaiz K, & Shephard, Charles D. (2010). *Innovation Management*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba
- Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Adelia Shabrina Prameka, 2015, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Aali Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang), Universitas Brawijaya Malang.
- Andi Haris A shary Abdillah, 2015, Implementasi Peraturan Daer ah Nomor 2 tahun 2012 tentan Pajak Reklame (study Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan D aerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 S/D 2015, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Andi Mahyudin Pawiloi, 2014, Analisis Kontribusi Pajak dan Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, Tax & Accounting Vol 1, No 1
- Dwi Indah Lestari, A. ., Santika, I. ., Tarisa, W. ., & Panorama, M. . (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN MUSEUM BALAPUTRADEWA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG . SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(1), 11–22. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.1
- Ilham, R. (2019). N et al.(2019). Comparative of the Supply Chain and Block Chains to Increase the Country Revenues via Virtual Tax Transactions and Replacing Future of Money. International Journal of Suplly Chain Management, 8(5).
- Liberti Pandiangan. 2014. Administrasi perpajakan. Erlangga
- Mardiasmo. 2010. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moh. Nazir. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi Keempat. Edisi dalam Bahasa Indonesia, penerjemah: Achmad Fawaid dan Rinayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Liswatin

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.15



George C. Edward III dalam Islami (2006:127) *Implementing Public Policy*. New Jersey: Congressional Quarterly Press.

Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed)*. New York: SAGE Publications, Inc.